



DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM ADMM-PLUS EXPERT'S WORKING GROUPS ON MARITIME SECURITY TAHUN 2023

¹Marsello Graitto Soplanit, ^{2*}Irmawan Effendi

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta

*Surel: irmawan@iisip.ac.id

Tanggal pengiriman: 15 Juli 2024 | Tanggal revisi: 20 September 2024 | Tanggal diterima: 20 Oktober 2024

ABSTRACT

This article explains Indonesia's maritime diplomacy in the ADMM-Plus Experts' Working Group (EWG) on Maritime Security in 2023. This research aims to explore the significance of Indonesia's participation in this multilateral forum, with a focus on Indonesia's national interests. The research method used is qualitative with an internet-based research and document-based research approach and is supported by the concepts of maritime diplomacy and foreign policy. The research results show that Indonesia's participation in the ADMM-Plus EWG aim to strengthen Indonesia's identity as the world's maritime axis and promote international norms that support maritime peace and security in the Asia-Pacific region. This reflects the importance of Indonesia's maritime diplomacy as an instrument to achieve national and international strategic goals as well as Indonesia's contribution in the context of regional and global maritime security.

Keywords: Maritime Diplomacy, Foreign Policy, Maritime Security, ADMM-Plus, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan diplomasi maritim Indonesia dalam ADMM-Plus Experts' Working Group (EWG) on Maritime Security pada tahun 2023. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi signifikansi partisipasi Indonesia dalam forum multilateral ini, dengan fokus pada kepentingan nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan berbasis studi pustaka dan internet dan didukung oleh konsep diplomasi maritim dan politik luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia dalam ADMM-Plus EWG bertujuan untuk menguatkan identitas Indonesia sebagai poros maritim dunia dan promosi norma-norma internasional yang mendukung perdamaian dan keamanan maritim di kawasan Asia-Pasifik. Ini mencerminkan pentingnya diplomasi maritim Indonesia sebagai instrumen untuk mencapai tujuan strategis nasional dan internasional serta kontribusi Indonesia dalam konteks keamanan maritim regional dan global.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, Politik Luar Negeri, Keamanan Maritim, ADMM-Plus, Indonesia

LATAR BELAKANG

Dinamika hubungan antarnegara di wilayah maritim semakin meningkat. Kondisi ini diakibatkan oleh posisi strategis lautan sebagai penghubung antarpulau dan antarnegara. Peningkatan dinamika dan pasang surut ini perlu dibarengi dengan tata kelola dan kerja sama maritim yang kuat. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi strategis dalam peta maritim global. Negara ini memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa, dengan luas wilayah laut yang mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayahnya. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai pusat lintasan pelayaran internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, serta menjadikannya titik kunci dalam perdagangan global. Oleh karena itu, keamanan maritim merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional Indonesia (Susanto, 2017).

Sejak tahun 2010, *ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus* (ADMM-Plus) telah menjadi platform penting bagi kerja sama pertahanan di kawasan Asia-Pasifik yang melibatkan negara-negara ASEAN dan delapan mitra dialog utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Rusia, dan Selandia Baru. ADMM-Plus bertujuan untuk memperkuat keamanan regional melalui berbagai inisiatif dan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk keamanan maritim (ASEAN, 2010).

ADMM-Plus Experts' Working Group (EWG) on Maritime Security menjadi salah satu forum di mana Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam diplomasi maritim untuk menjaga stabilitas dan keamanan perairan regional. Forum ini memungkinkan negara-negara anggota untuk berbagi informasi, melakukan latihan bersama, dan mengembangkan kapasitas dalam menangani isu-isu keamanan maritim. Melalui partisipasinya dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*, Indonesia berusaha untuk meningkatkan kapasitas keamanan maritimnya,

memperkuat kerja sama regional, serta mempromosikan norma-norma internasional yang mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan (Bateman, 2012).

Selain itu, diplomasi maritim yang dijalankan dalam kerangka *ADMM-Plus* juga mencakup upaya untuk menangani berbagai tantangan keamanan maritim seperti pembajakan, perdagangan manusia, dan pencurian ikan ilegal. Isu pembajakan di perairan Asia Tenggara, terutama di Selat Malaka, telah menjadi perhatian utama bagi negara-negara di kawasan ini. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dan tindakan pembajakan dapat mengancam keamanan kapal serta berdampak negatif terhadap perdagangan global. Dalam hal ini, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain melalui *ADMM-Plus* untuk meningkatkan patroli maritim, berbagi intelijen, dan mengadakan latihan bersama dalam rangka mencegah dan menanggulangi aksi pembajakan (Raymond, 2009).

Perdagangan manusia juga menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Perairan Indonesia sering kali digunakan sebagai jalur transit bagi perdagangan manusia yang melibatkan migran ilegal dari berbagai negara. Melalui *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*, Indonesia berusaha untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya mengidentifikasi dan menangkap pelaku perdagangan manusia, serta memberikan perlindungan kepada para korban. Upaya ini melibatkan peningkatan kapasitas penegakan hukum maritim, termasuk pelatihan bagi personel keamanan maritim dan peningkatan teknologi pengawasan (Vaggione, 2018).

Selain itu, pencurian ikan ilegal (*illegal, unreported, and unregulated fishing/IUU fishing*) merupakan masalah serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia, dengan wilayah lautnya yang luas, sering menjadi sasaran aktivitas *IUU fishing*. Diplomasi maritim Indonesia dalam kerangka *ADMM-Plus* berfokus pada penguatan kerja sama regional untuk memerangi *IUU fishing*, termasuk peningkatan patroli maritim, pertukaran informasi, dan koordinasi

penegakan hukum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memastikan kesejahteraan nelayan lokal (Nurdin, 2020).

Secara keseluruhan, partisipasi aktif Indonesia dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* mencerminkan komitmen negara ini untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional melalui diplomasi maritim yang efektif. Melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia berupaya untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memperkuat keamanannya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global.

Indonesia saat ini berada di posisi yang semu dengan identitas sebagai poros maritim dunia. Pada satu sisi, visi samudera pemerintahan Joko Widodo terlihat selaras dengan wawasan nusantara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentuk ancaman yang variatif seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan maupun *illegal fishing* (Dirhamsyah et al., 2022; Pudjiastuti et al., n.d.; Zou, 2023). Namun, pada kenyataannya, masih banyak masalah pekerjaan rumah dalam menguatkan sisi infrastruktur dan kemampuan keamanan maritimnya.

Maka dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis dan menjawab mengenai upaya Indonesia dalam mewujudkan kepentingan Indonesia yang ingin dicapai dalam melakukan cara diplomasi maritim melalui *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* tahun 2023. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan konsep diplomasi maritim yang merujuk pada upaya dan strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan keamanan melalui pemanfaatan sumber daya maritim dan kekuatan angkatan laut. Serta, politik luar negeri sebagai upaya negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di panggung internasional dengan menggunakan berbagai instrumen, termasuk diplomasi, ekonomi, dan militer.

TINJAUAN PUSTAKA

Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim, sebagaimana tujuan diplomasi lainnya, merujuk pada sektor tujuan sebagai dasar tujuan kepentingan nasional. Misalkan, diplomasi antariksa, mengarah pada pencapaian kepentingan Indonesia di ruang antariksa (Pradana et al., 2022). Diplomasi maritim adalah serangkaian upaya dan strategi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan keamanan melalui pemanfaatan sumber daya maritim dan kekuatan angkatan laut. Menurut Geoffrey Till, seorang ahli strategi maritim, diplomasi maritim adalah *“the use of naval forces in peace-time as instruments of state policy to achieve political objectives.”* Dalam pandangan Till, diplomasi maritim mencakup berbagai aktivitas seperti latihan militer gabungan, operasi keamanan maritim, serta keterlibatan dalam organisasi maritim internasional untuk memperkuat hubungan diplomatik dan menunjukkan komitmen suatu negara terhadap keamanan dan stabilitas regional (Till, 2013).

Ahli lainnya, Sam Bateman mendefinisikan diplomasi maritim sebagai *“a means of utilizing naval power and maritime capabilities to influence the behavior of other states and non-state actors in ways that promote national interests and security objectives.”* Menurut Bateman, diplomasi maritim tidak hanya terbatas pada operasi militer tetapi juga melibatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan maritim, bantuan kemanusiaan, dan respons terhadap bencana alam. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya kerja sama internasional dan peran diplomasi maritim dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global (Bateman, 2005).

Selain itu, Colin S. Gray, dalam bukunya *“The Navy in the Post-Cold War World”*, menekankan bahwa diplomasi maritim adalah *“an essential tool for states to project power, protect their interests, and maintain a presence in key strategic areas.”* Gray berpendapat bahwa diplomasi maritim memainkan peran penting dalam

mempertahankan kebebasan navigasi, melindungi rute perdagangan laut, dan mencegah konflik di wilayah maritim yang strategis. Dengan demikian, diplomasi maritim menjadi bagian integral dari strategi keamanan nasional banyak negara (Gray, 1994).

Diplomasi maritim juga sering dikaitkan dengan konsep "*blue diplomacy*" yang menekankan pada penggunaan sumber daya maritim untuk tujuan diplomatik. Richard A. Bitzinger, dalam artikelnya "*Blue Diplomacy: China's Maritime Assertiveness in the South China Sea*", menjelaskan bahwa "*blue diplomacy*" adalah bentuk diplomasi yang memanfaatkan kekuatan maritim untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri dan mencapai tujuan strategis. Bitzinger mencatat bahwa "*blue diplomacy*" mencakup berbagai aktivitas mulai dari patroli laut, latihan militer gabungan, hingga pembangunan infrastruktur maritim untuk memperkuat posisi negosiasi suatu negara di arena internasional (Bitzinger, 2012).

Lebih lanjut, James Holmes dan Toshi Yoshihara, dalam buku mereka "*Red Star over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy*", menyoroti bahwa diplomasi maritim Tiongkok mencakup pembangunan kekuatan angkatan laut, kerja sama dengan negara-negara maritim lain, dan partisipasi aktif dalam organisasi maritim internasional sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pengaruh dan kehadiran globalnya. Mereka menekankan bahwa diplomasi maritim merupakan alat penting bagi Tiongkok untuk memperkuat klaim teritorialnya dan melindungi kepentingan ekonominya di kawasan Asia-Pasifik (Holmes & Yoshihara, 2018).

Pada awalnya, diplomasi maritim terfokus pada pengaturan perdagangan, eksploitasi sumber daya alam, dan pengelolaan konflik di jalur perdagangan utama. Contohnya adalah periode penjelajahan laut pada abad ke-15 dan 16 oleh negara-negara Eropa, yang menggunakan armada laut untuk mengamankan rute perdagangan dan mengklaim wilayah baru (Till, 2009). Perkembangan ini mencakup

pembentukan aliansi maritim, seperti Liga Hanseatic dan Liga Delapan Belas. Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, fokus diplomasi maritim bergeser menjadi pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan pengaturan hukum laut internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 menjadi tonggak penting dalam mengatur hak dan kewajiban negara-negara di laut lepas, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen (United Nations, 1982). UNCLOS menetapkan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengelola persaingan ekonomi dan keamanan di wilayah laut internasional.

Abad ke-21 membawa tantangan baru bagi diplomasi maritim, termasuk meningkatnya perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut, meningkatnya aktivitas keamanan di wilayah maritim yang sensitif, dan persaingan geopolitik atas rute perdagangan dan sumber daya alam. Negara-negara menghadapi tekanan untuk mengembangkan strategi yang inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, sambil menjaga keamanan maritim dari ancaman seperti pembajakan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas.

Pentingnya diplomasi maritim juga tercermin dalam upaya-upaya untuk membangun kerja sama regional dan internasional melalui forum-forum seperti ADMM-Plus, di mana negara-negara berbagi informasi, melatih personel, dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan keamanan maritim secara kolektif. Kerja sama semacam ini tidak hanya memperkuat stabilitas regional, tetapi juga mempromosikan norma-norma internasional yang mendukung perdamaian dan keamanan global.

Secara keseluruhan, perkembangan diplomasi maritim mencerminkan adaptasi negara-negara terhadap dinamika kompleks di wilayah laut global. Dari pengelolaan konflik tradisional hingga isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan lingkungan dan keamanan transnasional, diplomasi maritim terus berperan sebagai

instrumen kunci dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan laut global. Diplomasi maritim melibatkan sejumlah indikator yang penting untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan-tujuan strategis negara di wilayah maritim. Menurut ahli dalam studi maritim, indikator-indikator ini mencakup beberapa kategori utama yang mencerminkan berbagai aspek dari aktivitas diplomasi maritim.

Salah satu kategori utama dalam indikator diplomasi maritim adalah keamanan maritim. Ini mencakup kemampuan suatu negara untuk melindungi wilayah maritimnya dari ancaman seperti pembajakan, perdagangan manusia, dan pencurian ikan ilegal. Indikator dalam kategori ini meliputi tingkat kejahatan laut yang berhasil ditekan, jumlah operasi patroli maritim yang dilakukan, serta kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal penegakan hukum di laut (Ong, 2011). Kategori selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya laut. Diplomasi maritim juga mencakup upaya untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk perikanan, energi, dan mineral. Indikator untuk kategori ini meliputi keberlanjutan ekosistem laut, keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekosistem yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut, serta partisipasi dalam perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan (Wong, 2015).

Kerja sama regional dan internasional merupakan aspek penting lainnya dari diplomasi maritim. Kategori ini mencakup kemampuan suatu negara untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional dalam upaya untuk meningkatkan keamanan maritim, mengelola sumber daya laut secara efisien, dan mengatasi tantangan bersama di wilayah maritim. Indikator dalam kategori ini termasuk jumlah perjanjian kerja sama maritim yang berhasil dinegosiasikan, partisipasi dalam forum-forum regional dan internasional tentang keamanan maritim, serta efektivitas dalam berbagi informasi dan intelijen maritim (Klein, 2010).

Selain itu, infrastruktur maritim juga menjadi fokus dalam diplomasi maritim. Ini mencakup pengembangan pelabuhan, jaringan transportasi maritim, dan fasilitas logistik lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan keamanan di laut. Indikator dalam kategori ini termasuk jumlah investasi dalam pengembangan infrastruktur maritim, efisiensi operasional dari pelabuhan-pelabuhan utama, serta kapasitas untuk menangani pertumbuhan lalu lintas kapal dan kargo (Rashid, 2017).

Pendidikan dan pelatihan maritim juga merupakan aspek kritis dalam diplomasi maritim. Kategori ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas maritim, termasuk pelaut, penjaga pantai, dan personel terkait lainnya. Indikator dalam kategori ini meliputi investasi dalam program pendidikan maritim, jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan maritim, serta keberhasilan dalam meningkatkan standar profesionalisme di bidang maritim (Jones, 2013).

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang berbagai aspek diplomasi maritim dan membantu untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan-tujuan strategis di wilayah maritim. Dengan mempertimbangkan berbagai kategori ini, suatu negara dapat mengembangkan kebijakan luar negeri yang efektif untuk mengelola sumber daya laut, meningkatkan keamanan maritim, serta memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya di laut.

Diplomasi maritim sebagai bentuk spesifik dari diplomasi yang fokus pada keamanan dan pengelolaan sumber daya laut, memainkan peran sentral dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama melalui partisipasinya dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*. Indonesia memiliki kepentingan strategis yang besar dalam memastikan keamanan dan stabilitas di perairan regional Indo-Pasifik.

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah serangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dan interaksi dengan negara-negara lain, serta dengan aktor internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Menurut ahli hubungan internasional, Hans J. Morgenthau, politik luar negeri adalah upaya negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di panggung internasional dengan menggunakan berbagai instrumen, termasuk diplomasi, ekonomi, dan militer (Morgenthau, 2006). Sementara itu, Joseph S. Nye, seorang ahli dalam bidang *soft power*, menyatakan bahwa politik luar negeri juga mencakup upaya untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang kooperatif (Nye, 2004).

Perkembangan politik luar negeri dapat ditelusuri melalui beberapa tahap sejarah. Pada masa awal, politik luar negeri didominasi oleh upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara melalui aliansi dan perjanjian militer. Contohnya adalah Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan menetapkan prinsip-prinsip kedaulatan negara modern. Selama abad ke-19, dengan munculnya negara-negara kolonial, politik luar negeri banyak berfokus pada ekspansi wilayah dan dominasi kekuasaan. Namun, setelah Perang Dunia II ada pergeseran signifikan dengan munculnya institusi-institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong kerjasama multilateral dan penyelesaian konflik secara damai. Era Perang Dingin memperlihatkan politik luar negeri yang dipengaruhi oleh ideologi, dengan blok Barat dan Timur saling berkompetisi untuk mendapatkan pengaruh global (Gaddis, 2005).

Memasuki abad ke-21, politik luar negeri semakin kompleks dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, terorisme, dan perdagangan internasional yang membutuhkan pendekatan multilateral dan diplomasi yang canggih. Teknologi

informasi dan komunikasi juga telah mengubah cara negara-negara berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah penggunaan media sosial dalam diplomasi publik, di mana negara dapat langsung berkomunikasi dengan publik internasional untuk membangun citra positif dan mendukung kebijakan luar negeri mereka (Manor, 2019).

Indikator politik luar negeri mencakup berbagai aspek yang dapat diukur untuk menilai kinerja dan efektivitas kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu indikator utama adalah kekuatan diplomasi, yang dapat dilihat dari jumlah perjanjian internasional yang berhasil diratifikasi dan keanggotaan dalam organisasi internasional. Selain itu, kekuatan ekonomi juga menjadi indikator penting, termasuk tingkat investasi asing langsung (FDI) dan neraca perdagangan internasional. Indikator lain adalah kemampuan militer, yang meliputi anggaran pertahanan, kekuatan personel militer, dan teknologi pertahanan yang dimiliki.

Sementara itu, daya tarik budaya, atau *soft power* juga menjadi indikator yang semakin penting. *Soft power* mencakup pengaruh budaya, pendidikan, dan nilai-nilai politik yang dapat menarik negara lain untuk bekerja sama atau mendukung kebijakan suatu negara. Menurut Nye, keberhasilan *soft power* dapat diukur melalui popularitas budaya (seperti film dan musik), jumlah mahasiswa asing yang belajar di negara tersebut, dan penerimaan terhadap nilai-nilai politik seperti demokrasi dan hak asasi manusia (Nye, 2004).

Indikator politik luar negeri juga mencakup aspek-aspek lainnya seperti stabilitas politik domestik, kualitas pemerintahan, dan dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri. Negara dengan stabilitas politik yang tinggi dan pemerintahan yang efektif cenderung memiliki kebijakan luar negeri yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Dukungan publik juga penting karena kebijakan luar negeri yang kontroversial atau tidak populer dapat menyebabkan ketidakstabilan domestik dan mengurangi efektivitas diplomasi (Goldstein & Pevehouse, 2014).

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui interpretasi makna, konteks, dan karakteristik konteksnya. Menurut ahli metodologi, pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif, analisis yang mendalam, dan interpretasi yang cermat untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini cenderung bersifat induktif, di mana teori dan konsep dikembangkan dari data yang terkumpul, bukan dari hipotesis yang diuji secara langsung seperti dalam penelitian kuantitatif (Creswell, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *internet-based research*. Pendekatan penelitian yang mengandalkan internet sebagai sumber utama data dan informasi. Metode ini sering digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif melalui analisis konten dari berbagai sumber daring seperti situs web, forum diskusi, media sosial, dan dokumen elektronik.

DISKUSI

Kondisi Maritim Indonesia Tahun 2023

Pada tahun 2023, keamanan maritim Indonesia berada dalam fokus yang signifikan, dipicu oleh berbagai tantangan dan dinamika yang mempengaruhi wilayah maritim negara tersebut. Salah satu isu utama adalah meningkatnya ancaman dari praktik *IUU fishing*. Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia menyebutkan bahwa meskipun ada penurunan dalam jumlah insiden *IUU fishing* dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, aktivitas ini masih menjadi ancaman besar bagi kelestarian sumber daya laut Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2023).

Selain itu, dinamika keamanan maritim juga dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia, meskipun bukan pengklaim langsung dalam perselisihan teritorial ini, tetap merasakan dampaknya. Terdapat peningkatan aktivitas militer dan patroli di wilayah perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Pemerintah Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut sebagai langkah preventif untuk mengamankan kepentingan nasional di zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka (CSIS Report, 2023).

Dinamika kebijakan maritim Indonesia pada tahun 2023 juga mencakup upaya untuk meningkatkan kolaborasi regional dan internasional. Indonesia memainkan peran aktif dalam forum-forum maritim seperti ADMM-Plus untuk menggalang kerja sama dalam menangani isu-isu keamanan maritim. Diplomasi maritim menjadi kunci dalam strategi keamanan maritim Indonesia, yang melibatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Teknologi maritim mendapatkan perhatian sebagai bagian dari strategi keamanan. Pemanfaatan teknologi seperti *drone* dan satelit untuk memantau aktivitas maritim telah diperluas. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memperkuat kapasitas pemantauan dan pengawasan. Menurut laporan dari *The Asia Maritime Transparency Initiative*, peningkatan teknologi ini telah membantu Indonesia dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran maritim secara lebih efektif (BAKAMLA, 2023).

Dalam rangka memperkuat keamanan maritim, Indonesia juga fokus pada pembangunan kapasitas nelayan lokal. Program-program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan nelayan ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki peralatan dan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi tantangan di laut. Hal ini sejalan dengan strategi ketahanan maritim yang menyeluruh, yang tidak hanya

melibatkan aspek militer dan penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat pesisir (PPN, 2023).

Pada tahun 2023, pengelolaan sumber daya laut Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa aspek, meskipun tantangan tetap ada. Salah satu perkembangan penting adalah peningkatan perhatian pemerintah terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Ahli kelautan, peningkatan ini didorong oleh kebijakan yang lebih tegas terhadap penangkapan ikan ilegal dan eksploitasi berlebihan di perairan Indonesia. Langkah-langkah seperti penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal telah memberikan efek jera yang signifikan dan membantu mengurangi aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia (Pudjiastuti, 2023).

Selain itu, program-program konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut seperti terumbu karang dan hutan bakau semakin digalakkan. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat pesisir dan dukungan teknologi modern untuk memantau kondisi ekosistem secara *real-time*. Penggunaan teknologi *drone* dan satelit dalam pemantauan ekosistem laut telah menjadi salah satu inovasi penting yang membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan menanggulangi kerusakan ekosistem secara lebih efektif.

Tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut tetap signifikan. Perubahan iklim dan pencemaran laut masih menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Kenaikan suhu laut dan perubahan pola cuaca mengakibatkan perubahan distribusi ikan dan merusak habitat penting seperti terumbu karang. Selain itu, pencemaran plastik di laut terus meningkat, yang tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut yang terkontaminasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas internasional menjadi semakin penting. Sinergi antara berbagai pihak

ini diperlukan untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Misalnya, inisiatif seperti *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, telah menunjukkan potensi besar dalam melindungi keanekaragaman hayati laut dan mendukung ketahanan ekosistem laut di kawasan ini (Coral Triangle Initiative, 2023).

Kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir juga menjadi fokus utama. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir, seperti bantuan modal usaha untuk nelayan kecil dan pelatihan keterampilan alternatif. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya laut dan menyediakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya laut Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa bidang, namun masih dihadapkan pada tantangan-tantangan besar yang memerlukan penanganan holistik dan kolaboratif. Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum yang tegas, inovasi teknologi, partisipasi masyarakat, dan kerja sama internasional menjadi kunci utama dalam mencapai keberlanjutan sumber daya laut Indonesia di masa depan.

Pada tahun 2023, ekonomi maritim Indonesia menunjukkan perkembangan namun tetap menghadapi berbagai tantangan. Sektor maritim Indonesia masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi seperti perikanan, transportasi laut, pariwisata maritim, serta industri galangan kapal dan *offshore*. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDB meningkat sebesar 7,5% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh

peningkatan produksi ikan dan ekspor hasil laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

Selain kontribusi terhadap PDB, sektor maritim juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya terus mengalami peningkatan volume kargo, mencerminkan pertumbuhan aktivitas perdagangan. Pemerintah Indonesia, melalui program tol laut, berupaya meningkatkan konektivitas antarpulau dan mengurangi disparitas harga barang antara wilayah barat dan timur Indonesia. Program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, meskipun masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur dan manajemen logistik.

Meski mengalami kemajuan, sektor maritim Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Isu keamanan maritim tetap menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan *illegal fishing*, penyelundupan, dan perompakan. Menurut data dari Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), jumlah kasus *illegal fishing* oleh kapal asing menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, berkat intensifikasi patroli dan penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, ancaman dari perompakan dan penyelundupan narkoba melalui jalur laut masih memerlukan perhatian khusus. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi tantangan yang signifikan bagi sektor maritim, dengan kenaikan permukaan laut dan perubahan pola cuaca yang berdampak pada produktivitas perikanan dan infrastruktur pesisir (BAKAMLA, 2023).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sektor maritim. Salah satu langkah strategis adalah pengembangan *blue economy* yang berkelanjutan, yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Upaya ini meliputi peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan teknologi, pengembangan kawasan konservasi laut, serta peningkatan

pengawasan dan penegakan hukum di laut. Para ahli menyatakan bahwa dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, sektor maritim Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial bangsa.

Secara keseluruhan, kondisi dan dinamika ekonomi maritim Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan perkembangan positif namun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, sektor maritim diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pembangunan nasional dan menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang berkelanjutan.

ADMM-Plus Experts' Working Group on Maritim Security

ADMM-Plus EWG on Maritime Security dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan pertama ADMM berlangsung pada tahun 2006 dan ADMM-Plus diresmikan pada tahun 2010 di Hanoi, Vietnam. ADMM-Plus melibatkan 10 negara anggota ASEAN bersama dengan delapan negara mitra dialog utama, yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Pembentukan kelompok kerja ahli pada keamanan maritim ini mencerminkan komitmen negara-negara tersebut untuk menangani isu-isu keamanan maritim melalui pendekatan multilateral yang terkoordinasi.

ADMM-Plus EWG on Maritime Security terdiri dari negara-negara anggota ASEAN dan delapan negara mitra dialog ADMM-Plus. Negara-negara ASEAN yang tergabung meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara mitra dialog mencakup Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Setiap negara anggota diwakili oleh pejabat dan ahli di bidang

keamanan maritim yang bekerja sama dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan inisiatif yang berkaitan dengan keamanan maritim di kawasan tersebut.

Tujuan utama dari *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara negara-negara anggota dalam menangani tantangan keamanan maritim. Tujuan lainnya termasuk memperkuat kapasitas dan kemampuan negara-negara anggota dalam mengatasi ancaman maritim, seperti pembajakan, penyelundupan, dan kegiatan ilegal lainnya di laut. Kelompok kerja ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi di antara negara-negara anggota melalui latihan bersama, pertukaran informasi, dan dialog kebijakan.

Fungsi utama dari *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* adalah untuk menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai isu-isu keamanan maritim. Kelompok kerja ini juga berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta strategi bersama untuk mengatasi ancaman maritim. Selain itu, *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* berfungsi sebagai platform untuk mengadakan latihan dan latihan bersama, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan interoperabilitas angkatan laut negara-negara anggota dalam menghadapi situasi darurat di laut.

Peran *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* sangat krusial dalam memperkuat keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Kelompok kerja ini berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan kerja sama antara negara-negara anggota melalui inisiatif-inisiatif praktis yang mencakup latihan maritim gabungan, patroli terkoordinasi, dan pertukaran informasi intelijen. Selain itu, *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya regional untuk membangun kapasitas dalam menghadapi ancaman maritim yang kompleks dan beragam. Melalui kerja sama yang erat dengan organisasi

internasional dan regional lainnya, kelompok kerja ini berkontribusi pada peningkatan stabilitas dan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara.

ADMM-Plus EWG on Maritime Security merupakan inisiatif penting dalam kerangka kerja ADMM-Plus yang bertujuan untuk mengatasi tantangan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Dengan anggota yang terdiri dari negara-negara ASEAN dan delapan negara mitra dialog, kelompok kerja ini memiliki peran vital dalam memperkuat kerja sama regional dan meningkatkan kapasitas negara-negara anggota dalam menangani ancaman maritim. Melalui berbagai kegiatan dan inisiatif, *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* berkomitmen untuk menciptakan lingkungan maritim yang aman dan stabil, yang pada akhirnya akan mendukung perdamaian dan keamanan regional secara keseluruhan.

Kepentingan Indonesia Melakukan Diplomasi Maritim melalui *ADMM-Plus Experts' Working Group on Maritime Security*

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis yang signifikan dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim. Laut bukan hanya menyediakan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga jalur utama perdagangan internasional yang vital bagi perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, upaya diplomasi maritim menjadi sangat penting untuk melindungi dan memanfaatkan potensi maritim secara optimal. Salah satu forum utama di mana Indonesia dapat memainkan peran diplomatik yang signifikan adalah *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*.

Diplomasi maritim melalui *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* memungkinkan Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan mitra dialog utama lainnya dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan maritim. Melalui kelompok kerja ini, Indonesia dapat memperkuat kerjasama regional dalam menghadapi ancaman seperti pembajakan, penyelundupan, dan aktivitas ilegal di

laut. Kerja sama ini tidak hanya penting untuk menjaga keamanan nasional, tetapi juga untuk memastikan kelancaran arus perdagangan dan stabilitas regional yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain aspek keamanan, diplomasi maritim melalui *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kapabilitas maritimnya. Dengan terlibat dalam latihan gabungan, pertukaran informasi, dan dialog kebijakan, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan teknis dan operasional angkatan laut serta lembaga terkait lainnya. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dalam bidang keamanan maritim dan meningkatkan kepercayaan negara-negara lain terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan.

Dalam jangka panjang, partisipasi aktif Indonesia dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* juga memiliki dampak positif terhadap diplomasi internasional Indonesia secara keseluruhan. Dengan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam isu-isu keamanan maritim, Indonesia dapat memperkuat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara mitra. Diplomasi yang efektif di bidang maritim akan meningkatkan profil Indonesia di panggung internasional dan memperkuat peran strategisnya dalam mendorong perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Dengan partisipasi aktif Indonesia dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*, Indonesia dapat melakukan upaya untuk mencapai kepentingannya di panggung internasional menggunakan instrumen diplomasi pada sektor maritim. Berikut kepentingan yang ingin dicapai Indonesia melalui diplomasi maritim dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*:

1. Memperkuat Identitas Poros Maritim Dunia

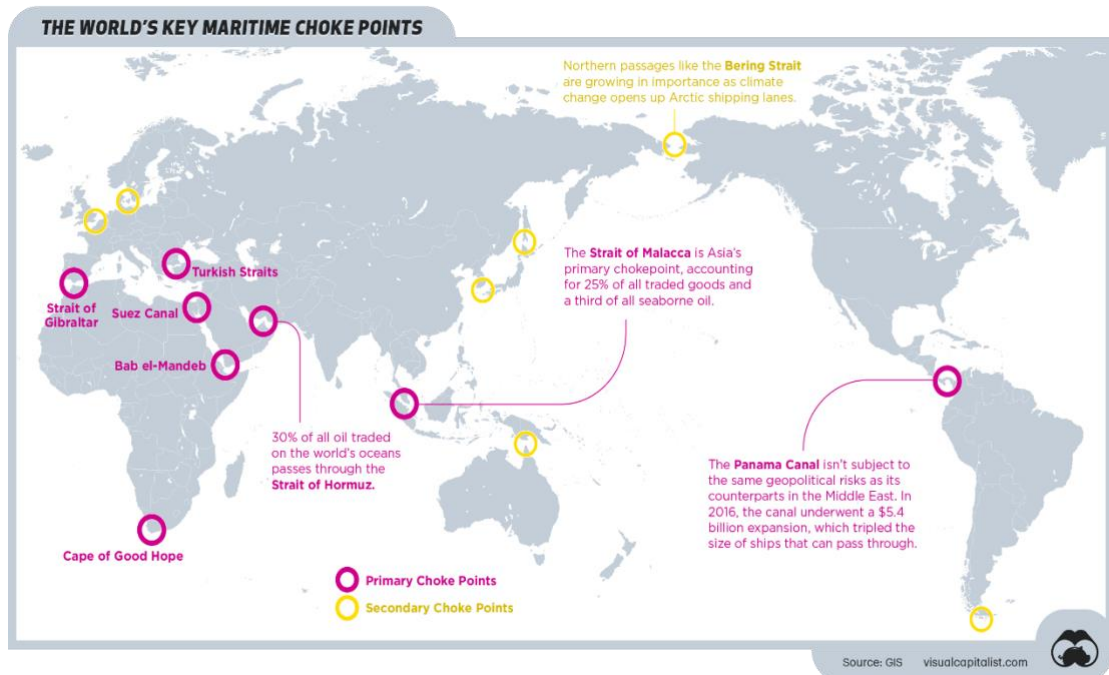
Identitas sebagai Poros Maritim Dunia merupakan visi strategis yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal masa jabatannya pada tahun

2014. Visi ini bertujuan untuk memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang strategis, terletak di antara dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di persimpangan rute perdagangan maritim internasional. Para ahli menilai bahwa identitas ini mencakup beberapa elemen kunci, yaitu pembangunan infrastruktur maritim, penguatan sektor ekonomi maritim, peningkatan kapasitas dan keamanan maritim, serta diplomasi maritim yang proaktif.

Pembangunan infrastruktur maritim merupakan komponen vital dari visi Poros Maritim Dunia. Indonesia telah berinvestasi besar dalam pembangunan pelabuhan, perbaikan jaringan transportasi laut, dan pengembangan tol laut untuk menghubungkan pulau-pulau di seluruh nusantara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah. Infrastruktur yang kuat diharapkan dapat memperkuat daya saing Indonesia dalam perdagangan global dan menarik lebih banyak investasi asing.

Identitas sebagai Poros Maritim Dunia memegang peranan penting dalam politik luar negeri Indonesia, mencerminkan ambisi negara untuk memainkan peran sentral dalam dinamika regional dan global. Konsep ini tidak hanya menekankan pentingnya aspek maritim bagi perekonomian nasional, tetapi juga memproyeksikan posisi Indonesia sebagai pemimpin maritim yang berpengaruh di Asia Tenggara dan sekitarnya.

Gambar 1.
Choke Point Utama di Dunia



Sumber: GIS

Indonesia terletak di persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikannya pusat jalur perdagangan maritim dunia. Dengan mengadopsi identitas Poros Maritim Dunia, Indonesia mempertegas posisinya sebagai pusat transit dan titik pertemuan bagi rute-rute maritim global. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengaruh Indonesia dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam urusan keamanan maritim global, di mana stabilitas di perairan Indonesia berdampak langsung pada stabilitas perdagangan global.

Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam berbagai forum internasional yang membahas isu-isu maritim, seperti ASEAN, *Indian Ocean Rim Association* (IORA), dan lainnya. Melalui diplomasi maritim yang proaktif, Indonesia dapat memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan-tantangan maritim seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan perompakan. Diplomasi ini juga memungkinkan Indonesia untuk mempromosikan

prinsip-prinsip hukum laut internasional dan mendukung terciptanya tata kelola maritim yang adil dan berkelanjutan.

Identitas sebagai Poros Maritim Dunia mendorong Indonesia untuk aktif dalam membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga dan mitra global. Melalui inisiatif-inisiatif seperti latihan maritim gabungan, pertukaran informasi, dan patroli terkoordinasi, Indonesia dapat meningkatkan keamanan maritim regional. Kerja sama ini juga memperkuat hubungan bilateral dan multilateral, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan keamanan regional secara keseluruhan.

Dengan fokus pada identitas Poros Maritim Dunia, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas dan teknologi maritimnya. Investasi dalam infrastruktur pelabuhan, kapal patroli, dan teknologi pengawasan maritim akan memperkuat kemampuan Indonesia untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya lautnya. Peningkatan kapasitas ini juga berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia dalam sektor maritim global, termasuk perikanan, pariwisata maritim, dan industri galangan kapal.

Identitas Poros Maritim Dunia juga mencakup komitmen Indonesia untuk mempromosikan ekonomi biru atau *Blue Economy* yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam hal pemanfaatan laut yang bertanggung jawab. Hal ini juga mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan melestarikan keanekaragaman hayati laut. Strategi ekonomi biru Indonesia di bawah identitas “Poros Maritim Dunia” memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada pemanfaatan optimal sumber daya kelautan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut.

Ekonomi biru mempromosikan pengembangan perikanan dan akuakultur berkelanjutan, yang akan memberikan kontribusi besar terhadap PDB Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar, diperkirakan mencapai nilai USD 280 miliar per tahun (Bank Dunia, 2019). Namun, Kementerian Maritim dan Investasi Indonesia mencatat bahwa capaian PDB dari ekonomi biru tahun 2022 baru sebesar USD 79 miliar atau setara dengan 6% PDB Indonesia tahun 2022, hanya sekitar 28% dari potensinya (Kementerian Maritim & Investasi Indonesia, 2023). Belum optimal, pemanfaatan ekonomi biru tersebut mendorong sejumlah lembaga internasional dan beberapa negara untuk menyusun peta jalan pengembangan dari ekonomi biru. Di Indonesia, Bappenas menyusun Indonesia *Blue Economy Roadmap* tahun 2023- 2045 yang secara umum berisi 4 strategi utama dan 5 fase pengembangan ekonomi biru Indonesia dengan target kontribusi ekonomi biru sebesar 12,45% dari PDB Indonesia di tahun 2045 (Bappenas, 2023). Karena itu, Indonesia terus berpartisipasi aktif dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security* agar memperbesar peluang dalam ekonomi biru.

2. Mempromosikan Norma-Norma Internasional yang Mendukung Perdamaian dan Keamanan Maritim

Indonesia telah aktif dalam mempromosikan norma-norma internasional yang mendukung perdamaian dan keamanan maritim, menjadikannya sebagai bagian integral dari kebijakan luar negerinya. Sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan 17.504 pulau, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah perairannya yang luas. Upaya-upaya ini tercermin dalam berbagai inisiatif diplomasi maritim yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia secara konsisten mendorong dialog dan kerja sama regional melalui forum-forum multilateral seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)* dan *IORA*. Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum ini, Indonesia berperan dalam membangun konsensus untuk mengatasi tantangan bersama seperti kejahatan lintas batas, piranti

laut ilegal, dan bantuan kemanusiaan di laut. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan maritim yang stabil dan aman di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.

Selain itu, Indonesia juga menjadi penggagas inisiatif regional seperti *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang terbesar di dunia. CTI tidak hanya memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tetapi juga mempromosikan keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara anggota dalam upaya pemantauan, patroli, dan penegakan hukum laut yang lebih efektif.

Di tingkat global, Indonesia aktif dalam mendukung implementasi dan penegakan hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). UNCLOS menjadi landasan hukum yang penting dalam menentukan batas-batas laut negara, hak dan kewajiban di laut lepas, serta pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Dukungan Indonesia terhadap UNCLOS menunjukkan komitmen dalam mempromosikan tatanan hukum internasional yang berkeadilan dan berdasarkan aturan untuk menjaga perdamaian dan keamanan maritim global. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam operasi perdamaian PBB, seperti misi perdamaian di Lebanon dan Kongo, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemeliharaan perdamaian global. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan internasional, termasuk di wilayah maritim yang penting untuk perdamaian global.

Indonesia telah aktif terlibat dalam memperkuat kerja sama hukum maritim di ASEAN melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola laut di wilayah ini. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah mendukung pembentukan kerangka kerja hukum yang lebih kuat dan koheren di tingkat regional. Sebagai contoh, Indonesia telah berperan penting dalam mendorong ASEAN untuk mengadopsi berbagai instrumen hukum maritim, seperti *Code of*

Conduct (CoC) atau Pedoman Perilaku Pihak-Pihak di Laut Tiongkok Selatan. CoC ini bertujuan untuk mengatur tindakan negara-negara di wilayah tersebut guna mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas di perairan yang strategis tersebut (Wahyuningrum, 2020).

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat implementasi hukum maritim. Misalnya, Indonesia sering kali menjadi tuan rumah pertemuan dan konferensi tingkat tinggi di bidang hukum laut yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama regional dalam hal penegakan hukum, pertukaran informasi, dan kapasitas institusional. Keikutsertaan aktif Indonesia dalam forum-forum ini tidak hanya memperkuat posisinya dalam tata kelola regional, tetapi juga mencerminkan komitmen yang kuat dalam mendukung keamanan maritim dan perlindungan lingkungan di kawasan ASEAN (Wibowo, 2019).

Selain upaya di tingkat multilateral, Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat kapasitas nasional dalam menangani isu-isu hukum maritim. Penguatan lembaga hukum, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut, merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia. Langkah-langkah ini juga sejalan dengan upaya lebih luas untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi di tingkat nasional sesuai dengan standar internasional dalam bidang hukum laut (Simamora, 2021).

Dengan demikian, upaya Indonesia untuk memperkuat hukum maritim di ASEAN tidak hanya berdampak positif secara langsung pada stabilitas regional, tetapi juga mencerminkan peran aktif negara ini dalam mempromosikan keamanan maritim dan keberlanjutan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia ingin membuktikan bahwa melalui inisiatif dalam mempromosikan norma-norma internasional yang mendukung perdamaian dan keamanan maritim, ASEAN dapat terus bergerak maju

dalam menghadapi tantangan kompleks yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut dan konflik di perairan strategis di wilayah ini.

KESIMPULAN

Indonesia telah secara aktif mendorong identitas “Poros Maritim Dunia” dan merumuskan strategi *blue economy* untuk mencapai berbagai kepentingan nasional dan regional, serta untuk mempromosikan norma-norma internasional yang mendukung perdamaian dan keamanan maritim di kawasan Asia-Pasifik. Melalui keterlibatannya dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*, Indonesia dapat lebih aktif lagi mengambil peran penting dalam membentuk arah kebijakan dan kerja sama regional yang berkelanjutan dalam bidang keamanan maritim.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada dua bagian penting yang dapat dilakukan Indonesia dalam mempersiapkan keamanan maritimnya. *Pertama*, identitas “Poros Maritim Dunia” menegaskan peran strategis Indonesia dalam dinamika ekonomi dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik yang didominasi oleh laut. Dalam konteks ini, Indonesia mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas maritimnya, termasuk pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarpulau dan antarnegara di kawasan ini. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional tetapi juga untuk mengonsolidasikan peran Indonesia sebagai penengah dan pemimpin dalam isu-isu maritim global.

Identitas ini juga masuk sebagai strategi ekonomi biru yaitu landasan penting dalam memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya berupaya untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan pariwisata bahari, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut. Langkah-langkah konkret seperti pengembangan

budidaya rumput laut untuk bioplastik dan biofuel, serta peningkatan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung perdagangan laut, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan.

Kedua, melalui *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*, Indonesia berperan dalam mempromosikan norma-norma internasional yang mendukung perdamaian dan keamanan maritim. Forum ini memberikan platform bagi Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam menghadapi tantangan keamanan maritim, seperti penangkapan ikan ilegal, kejahatan lintas batas, dan penanggulangan bencana laut. Dengan aktif mengedepankan diplomasi maritim, Indonesia berupaya membangun konsensus internasional dalam penerapan hukum laut internasional, termasuk UNCLOS, sebagai kerangka kerja yang mengatur tata kelola laut yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, melalui identitas “Poros Maritim Dunia” dan strategi ekonomi biru, Indonesia tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi nasional tetapi juga berperan aktif dalam mendukung stabilitas dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Melalui keterlibatannya dalam *ADMM-Plus EWG on Maritime Security*, Indonesia memperkuat posisinya sebagai aktor utama dalam mempromosikan norma-norma internasional yang mendukung perdamaian laut dan kerja sama maritim di tingkat regional dan global. Dengan demikian, peran Indonesia dalam forum-forum ini tidak hanya memberikan kontribusi substantif terhadap stabilitas keamanan maritim, tetapi juga mencerminkan komitmen jangka panjangnya terhadap pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan inklusif.

BIBLIOGRAFI

- ASEAN. (2010). *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM-Plus)*.
<https://asean.org/admm-plus>
- Bateman, S. (2012). Maritime Security Governance in the Indian Ocean Region. *Journal of the Indian Ocean Region*, 8(1), 3-17.

-
- Dirhamsyah, D., Umam, S., & Arifin, Z. (2022). Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing. *Ocean & Coastal Management*, 229, 106304. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>
- Gaddis, J. L. (2005). *The Cold War: A New History*. Penguin Books.
- Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2014). *International Relations*. Pearson.
- Kusumasari, B. (2023). The Vision of Indonesia as a Global Maritime Axis. *Journal of Maritime Affairs*, 3(2).
- Manor, I. (2019). *The Digitalization of Public Diplomacy*. Palgrave Macmillan.
- Marsetio. (2014). *Strategi Pertahanan Laut Nusantara: Menyongsong Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Morgenthau, H. J. (2006). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. McGraw-Hill.
- Nurdin, I. (2020). Penguatan Kerjasama Regional dalam Mengatasi Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. *Jurnal Keamanan Maritim*, 12(2), 45-60.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- Pradana, N. M., Effendi, I., Suryanjari, E., & Indarwati, N. (2022). Space Aset in Indonesia Diplomacy Against Japan 2016-2021. *BIRCI-Journal*, 5(3), 24958-24966. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6539>
- Priyanto, B. (2023). Strategic Importance of Indonesia's Maritime Policy. *Indonesian Maritime Review*, 8(1).
- Pudjiastuti, E., Putra, I., Susilo, A., Tinggi Manajemen IMMI, S., Tim, P., & Ps Minggu, K. (n.d.). *Vision of the World Maritime Axis of Indonesia as a Maritime Country in Alfred Thayer Mahan's Perspective*.
- Raymond, C. Z. (2009). Maritime Security Cooperation in the Straits of Malacca and Singapore. *S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University*.
- Setiawan, R. (2023). Sustainable Development in Indonesia's Maritime Sector. *Maritime Economic Journal*, 5(3).
- Simamora, B. (2021). Strengthening Maritime Governance in Indonesia: Legal and Institutional Frameworks. *Indonesian Journal of International Law*, 23(2), 112-128.
- Susanto, A. (2017). Posisi Strategis Indonesia dalam Peta Maritim Global. *Jurnal Geopolitik*, 15(1), 22-35.
- Till, G. (2013). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge.
- United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

-
- Vaggione, L. (2018). Human Trafficking and Maritime Security: A Growing Concern in Southeast Asia. *Marine Policy*, 94, 168-175.
- Wahyuningrum, S. (2020). Enhancing Maritime Security in Southeast Asia: ASEAN's Efforts and Challenges. *Journal of Southeast Asian Studies*, 17(2), 45-60. <https://doi.org/10.1111/jsas.12345>
- Wibowo, A. (2019). Indonesia's Role in Enhancing Maritime Law Enforcement in ASEAN: Challenges and Opportunities. *ASEAN Journal of Law and Policy*, 5(1), 78-92. <https://doi.org/10.1017/ajlp.2019.12>
- Widodo, J. (2023). Indonesia's Maritime Security Strategy. *Defense and Security Journal*, 7(4).
- Zou, Y. (2023). China and Indonesia's responses to maritime disputes in the South China Sea: forming a tacit understanding on security. *Marine Policy*, 149, 105502. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105502>